

dalam pertumbuhan dan kesejahteraan socio-ekonomi? Pertanyaan pertama berhubungan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap demokrasi politik. Terutama pemahaman dasar masyarakat desa Benteng Tado dalam memahami demokrasi politik.

Pertanyaan kedua berhubungan erat dengan pemahaman masyarakat mengenai peran timbal balik antara masyarakat desa Benteng Tado dengan wakil mereka di parlemen pasca pemilu. Hal ini juga berkaitan dengan peran calon legislatif yang mereka pilih terhadap kemajuan dan kesejahteraan bidang socio-ekonomi. Apakah aspirasi mereka terjawab atau mendapat tanggapan positif dari perwakilan mereka di parlemen. Sebab kinerja anggota parlemen diukur melalui perhatiannya terhadap daerah atau masyarakat yang diwakilinya. Oleh karena itu masyarakat desa Benteng Tado perlu mengetahui kinerja DPR, sehingga menentukan langkah selanjutnya ketika pemilu berikutnya dilaksanakan.

Maka penelitian ini bertujuan menggali sedalam-dalamnya pemahaman masyarakat desa benteng tado mengenai demokrasi politik secara menyeluruh. Untuk memahami pemahaman

masyarakat desa Benteng Tado mengenai demokrasi penelitian ini digali dengan pertama-tama melihat proses dan keterlibatan masyarakat desa Benteng Tado dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menghayati demokrasi. Pemilu dijadikan sebagai sebuah tolak ukur untuk menilai sejauh mana masyarakat memiliki pemahaman luas mengenai demokrasi politik. Keterlibatan di dalam pemilu tersebut sebagai momen keterlibatan masyarakat dalam menentukan wakilnya di parlemen dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi. Apakah masyarakat yang terlibat dalam pemilu mempunyai gambaran tentang apa yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun pasca pemilu, terutama kesejahteraan hidup mereka. Pokok persoalan ini berkaitan dengan manfaat memilih wakil rakyat di parlemen dan peran anggota parlemen dalam mengusahakan hidup yang berkeadilan dalam bidang sosial ekonomi.

Penelitian tentang peran masyarakat dalam pesta demokrasi telah banyak dilakukan. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 dikatakan, "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang" (*Undang-Undang Hasil*

pemerintahan maupun parlemen (Triono, 2017).

Usfinit *at. al* (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat kota Malang terbagi atas pemberian suara, kampanye, mencari jabatan politik, dan partisipasi dalam pemungutan suara (Usfinit, 2014). Demikian juga Mappakalu (2015) dalam penelitiannya memperluas penegasan demokrasi dengan mengatakan bahwa partisipasi politik masyarakat bukan hanya ikut memberikan suara pada setiap Pemilu/Pilkada, tetapi partisipasi politik masyarakat dapat dilihat pada keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Tidak hanya itu, tetapi juga peluang untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan (implementasi) dan pengawasan kebijaksanaan atau keputusan yang sudah ditetapkan (Mappakalu, 2009).

Hal yang sama juga yang diteliti oleh Basuki (2020) yang memberikan sebuah penegasan bahwa rakyat atau warga negara bukan hanya sebagai obyek, melainkan subyek dan ikut memainkan peranan penting dalam kehidupan kenegaraan (Basuki, 2020). Untuk itu keberadaan lembaga

perwakilan merupakan suatu kemutlakan yang harus dipenuhi dalam negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat (Wibowo et al., 2020). Meskipun demokrasi politik menyoroti peranserta masyarakat dalam kebebasan berpolitik, Saleh memberikan sebuah peringatan dalam hasil penelitiannya bahwa tidak ada demokrasi tanpa Partai Politik (Saleh, 2008). Keberadaan Partai Politik sejalan dengan munculnya pemikiran mengenai paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu, kader-kader dipersiapkan oleh partai politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, studi ini meminati terutama dunia pemahaman masyarakat desa Benteng Tado terhadap demokrasi politik, terutama pemahamannya terhadap pemilihan anggota legislatif serta pengaruh keterlibatan masyarakat desa Benteng Tado dalam pemilu terhadap kesejahteraan hidup sosial dan ekonominya. Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dalam

sangat lambat. Bahkan tidak menunjukkan pertumbuhan apa-apa.

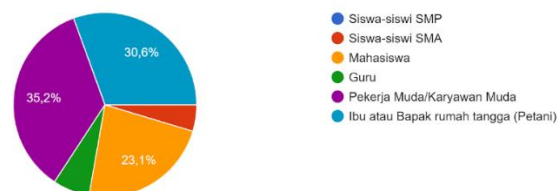
Secara ekonomi, masyarakat desa ini terdiri masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Secara umum berpencaharian bertani-bercocok tanam. Selain itu cukup banyak juga guru swasta dan negeri. Ada beberapa juga pedagang/pengusaha kecil. Anak-anak sekolah dari tingkat SMP-SMA tergolong banyak. Mahasiswa-mahasiswi terhitung banyak juga dari desa ini. Ada yang kuliah di Ruteng-Flores, Bali, Makassar, dan Jawa. Dalam hal ini kesadaran untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi/universitas semakin hari semakin bertumbuh. Walaupun diakui bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan formal baru mendapat perhatian serius sekitar sepuluh tahun terakhir.

Data Hasil Penelitian

Berikut hasil penelitian Kuantitatif dengan menggunakan *google form*. Penelitian ini berlangsung selama hampir sebulan, sejak 17 Oktober 2020-3 November 2020. Responden penelitian dengan *google form* ini adalah masyarakat desa Benteng Tado. Responden berjumlah 108 orang dari berbagai kategori usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan status pernikahan. Yang ditampilkan dalam uraian ini adalah

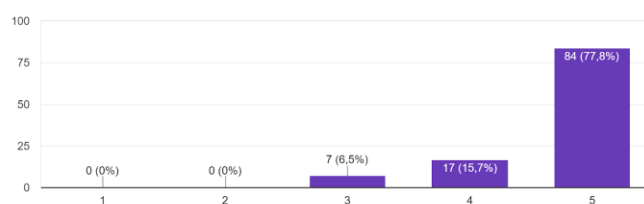
kategori status hidup, seperti tampak dalam diagram lingkaran berikut ini. Bisa dilihat bahwa responden terbanyak adalah pekerja muda atau karyawan muda, yaitu 35,2%. Berikut, menyusul ibu atau bapak rumah tangga (petani), yaitu 30,6% dan selanjutnya mahasiswa-mahasiswi, yaitu 23,1%. Kategori status hidup ini akan berguna dalam menganalisis jawaban atas pernyataan-pernyataan kuesioner.

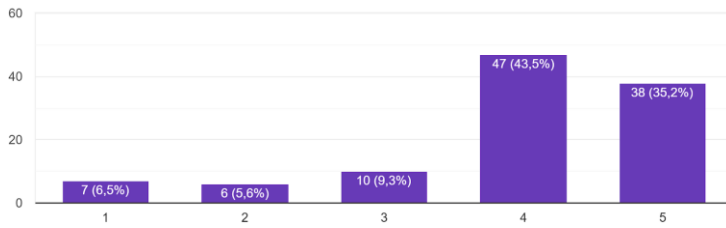
Status Hidup
108 tanggapan



Ada 6 pernyataan yang diwajibkan untuk dijawab oleh responden. Jawaban direntang dengan menggunakan skala linear dari angka 1-5. 1: sangat tidak setuju dan 5: sangat setuju. 2: tidak setuju, 3: kurang setuju, dan 4: setuju. Berikut ditampilkan dalam bentuk diagram.

1. Saya mengerti tentang DEMOKRASI
108 tanggapan





Di sini, lagi lagi memperlihatkan konsistensi yang jelas dari jawaban para responden. 35,25 responden mengafirmasi bahwa desa Benteng Tado mengalami ketidakadilan sosial dan ekonomi. Walaupun bukan persentase tertinggi, setidaknya kelompok yang menjawab setuju mengambil posisi tertinggi, yaitu 43,5%. Artinya, jawaban mereka tidak jauh berbeda dengan kelompok yang menjawab sangat setuju. Untuk menggali lebih jauh keterlibatan masyarakat dalam pemilu, maka dianggap perlu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat berpendapat mengenai tujuan dari pemilu itu sendiri ketika dikaitkan dengan kepentingan siapa di baliknya.

Jawaban terhadap pernyataan keenam tersebut berada pada wilayah setuju (42,3%) dan sangat setuju (41,2%). Artinya, secara umum masyarakat berpendapat dan mengalami bahwa pemilu yang seringkali mereka ikuti dimanfaatkan untuk kepentingan pengusaha/pemerintah daripada kesejahteraan masyarakat.

Demokrasi Politik Menurut Armada Riyanto

Mengejutkan bahwa pemahaman masyarakat desa Benteng Tado mengenai demokrasi, masih sangat sempit. Demokrasi politik tentu saja tidak sama dengan pemilu. Pemahaman Armada Riyanto mengenai politik sebagai tata kelola hidup bersama yang begitu ditekankan kiranya menjadi titik pijak untuk memperbaharui cara pandang mengenai demokrasi politik. Demokrasi itu keseluruhan keterlibatan masyarakat dalam membangun tata kelola kehidupan bersama, dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, adil, sejahtera, setara di hadapan hukum. Semua unsur itu menjadi bagian utuh dari demokrasi politik. Armada Riyanto (2014) mengatakan politik itu memiliki cakupan kedalaman pengalaman hidup manusia sebab di dalamnya dikelola kebudayaan pendidikan kecerdasan (*well being*) kesejahteraan, relasi personal-komunitas, tata religius, dunia ruang-lingkup kehidupan, tata kelola sumber daya alam dan manusia, komunikasi interpersonal, hukum-sistem peradilan, sejarah, peradaban manusiawi, sastra, retorika, aneka nilai kebersamaan, *kegotong-royongan*, solidaritas, dan

yang ada di hutan-hutan atau di pinggirannya di banyak wilayah di Indonesia merupakan kelompok warga negara yang tersisih. Menurut Armada Riyanto (2013) orang ketiga dalam *societas* adalah mereka yang tidak menjadi tuan atas pengalaman hidupnya sendiri, dalam konteks ini ketika masyarakat tersisih oleh kebijakan pembangunan. Masyarakat benar-benar menjadi orang ketiga dalam *societas*, yakni ketika layanan kesehatan pada level fundamental tidak dapat mereka nikmati, mereka jelas tergecet dari tata adil kehidupan. Ketika, fasilitas dasar seperti listrik, air, dan udara yang baik untuk hidup menjadi barang yang mahal, mereka menjadi kelompok orang ketiga. Sebagai orang ketiga, mereka “voiceless”. Tidak ada posibilitas partisipasi kehidupan bagi mereka. Mereka tidak berada di wilayah komunikasi pengambilan keputusan. Kenyataan semacam ini jelas tidak mengindikasikan struktur gramatika kehidupan yang manusiawi (A. Riyanto, 2013).

Situasi dan kondisi masyarakat yang “voiceless” dapat digambarkan seperti seseorang yang sedang menunggu kedatangan sahabatnya. Ada janji yang telah disepakati dan masing-masing berusaha menepatinya. Namun

apa yang terjadi? Waktu demi waktu berlalu tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Setiap orang yang lewat dan berlalu dikira sahabatnya. Begitulah waktu hidupnya berlalu tanpa kabar jelas dari sahabatnya. Janji tinggal janji. Politik itu kadang-kadang menarasikan pengkhianatan terhadap masyarakat kecil. Janji-janji politik yang digembargemborkan waktu kampanye menjadi racun yang melumpuhkan posibilitas kesejahteraan masyarakat. Jelas sekali bahwa masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan sikap politik mereka. Mereka tertekan oleh pengalaman hidup mereka sendiri yang setiap kali dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan pribadi atau kelompok tertentu (A. Riyanto, 2014).

Demokrasi politik itu menyoal keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesetaraan dihadapan hukum, kesejahteraan sosial, mendapatkan akses yang mudah dalam bidang ekonomi, kebebasan untuk beragama dan menjalankan agamanya. Demokrasi politik, singkat kata, menyoal keseharian masyarakat dalam keterlibatannya untuk memperjuangkan tata kelola hidup bersama yang lebih baik lebih adil (A. Riyanto, 2020). Kalau demokrasi politik di reduksi pada perkara keterlibatan dalam pesta

Keterlibatan Masyarakat Desa Benteng Tado dalam Pemilihan umum (Pemilu)

Jika politik sekadar sebuah pertarungan kekuasaan dan kepentingan sudah semestinya politik itu dicabut dari posibilitas terciptanya peradaban tata manusiawi. Penegasan yang sama berlaku dalam pesta demorasi rakyat, khususnya pemilihan anggota Legislatif (E. A. Riyanto, 2014). Sebab pemilu anggota legislatif lebih ditampilkan sebagai pertarungan kekuasaan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Pemilu tidak memberi perhatian kepada masyarakat, tetapi kepada caleg dan kepentingannya. Kepentingan masyarakatnya? Urusan belakangan! Demikianlah jargon yang kerap kali mewarnai pesta demokrasi di tanah air.

Masyarakat Desa Benteng Tado belum mengalami demokrasi politik yang sesungguhnya di negara ini. Kalau demokrasi politik itu diidentikkan dengan keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi rakyat maka terjadi apa yang namanya penyempitan pemahaman terhadap demokrasi. Apa yang terjadi sesungguhnya masih jauh dari harapan apa yang disebut sebagai demokrasi. Di berbagai tempat akses infrastruktur jalan dan listrik masih belum memadai bahkan tidak ada sama sekali. Di pedalaman

Kalimantan Barat hal yang sama juga terjadi di mana masyarakat mengalami kesulitan untuk akses perekonomian karena infrastruktur jalan tidak ada. Masyarakat, dalam berbagai hal, kadang-kadang menjadi korban dari para penguasa, elit politik, kelompok-kelompok radikal fundamentalis yang ingin menghancurkan negara ini. Sebagai demonstrasi besar-besaran di negara ini, misalnya, bagaikan kisah “dongeng” sebelum tidur di telinga masyarakat yang masih mengalami keterpurukan dalam bidang sosio-ekonomi. Demikianpun di telinga masyarakat desa Benteng Tado. Dongeng? Ini adalah sebuah sindiran dan pukulan berat terhadap pemerintah.

Pemilu seringkali menjadi tolok ukur keterlibatan masyarakat dalam demokrasi. Padahal, pemilu merupakan kesempatan bagi elit politik untuk mencari panggung. Bukan untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat desa benteng tado bukanlah masyarakat yang absen dari setiap pemilu di negara ini dalam segala tingkatnya. keterlibatan mereka untuk ikut membangun negara ini tidak diragukan. akan tetapi apa yang mereka peroleh? di sini tentu saja tidak memaksudkan bahwa keterlibatan mereka harus diganjari. sebab halnya sudah merupakan hak mereka untuk

diperhatikan oleh negara. dalam hal inilah mereka dilupakan. keterlibatan mereka dalam berpolitik tidak dibarengi perhatian para penguasa terhadap kesejahteraan hidup mereka.

Politik yang direduksi pada pertarungan kekuasaan dan kepentingan menjauhkan masyarakat dari keterlibatannya dalam kehidupan *societas*. *Societas* merupakan locus penghayatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana letak pengalaman masyarakat desa Benteng tado dalam demokrasi politik di tanah air? Harus diakui bahwa pengalaman mereka acap kali diabaikan dalam tata demokrasi. Pengalaman mereka “tidak menarik”, sehingga patut diabaikan.

Kesejahteraan Sosio-ekonomi Masyarakat Desa Benteng Tado

Keterpurukan *societas* terjadi oleh berbagai hal, seperti kesejahteraan ekonomi dan sosial yang tidak merata (A. Riyanto, 2020). Penegasan Riyanto tersebut meringkas pengalaman masyarakat desa Benteng Tado. Desa Benteng Tado, sampai saat ini, belum tersentuh oleh pembangunan yang merata. Ironis, karena di samping menggagas apa yang disebut sebagai keadilan sosial, di sisi lain begitu banyak masyarakat tidak diperhatikan dalam

pengalaman kesehariannya. Tidak diberi akses yang mudah.

Masyarakat hanya sarana untuk meraih apa yang menjadi kepentingan *caleg*. Ristian mengamini bahwa demokrasi yang selama ini diidam-idamkan banyak rakyat untuk mencapai satu kesejahteraan, ternyata tidak lebih dari sekedar “mainan” yang dipermain oleh elit politik (Ristian, 2016). Masyarakat desa Benteng Tado mengalami kenyataan ini bertahun-tahun hingga saat ini (per oktober 2020). Mereka masih berjuang untuk menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan secara sosioekonomi. Sosial, karena mereka menjadi *societas* yang diabaikan. Ekonomi, karena infrastruktur standar seperi akses jalan raya dan listrik masih jauh dari harapan. Jalan beraspal yang sudah rusak. PLN belum masuk sama sekali ke daerah ini. Begitulah narasi masyarakat kecil yang teralienasi dari tata politik.

Tidak ada beritanya mengenai desa ini. Tidak ada! Janji untuk akses listrik, misalnya, sudah sejak lama sekali dijanjikan. Sampai saat ini belum ada realisasinya. Wacananya mungkin ada. Dibicarakan setiap tahun. Dijanjikan terus menerus. Tetapi realisasinya belum. Demokrasi seperti apa yang mau digagas dalam konteks demikian? Negara

ini sudah lama sekali memberikan ruang kebebasan kepada masyarakat. Ruang untuk menyampaikan pendapat. Ruang untuk diberlakukan seadil-adilnya. Ternyata belum merata. Masyarakat kecil masih mengalami ketidakadilan secara sosial dan ekonomi. Situasi serupa, tentu saja, tidak hanya dialami oleh desa Benteng Tado. Masih banyak daerah lain di pedalaman Flores, NTT mengalami nasib yang sama.

Situasi ini jika dibandingkan dengan fenomena menjelang pemilihan umum: pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden wakil presiden. Semua masyarakat didatangi dan didata untuk ikut dalam pemilihan umum. Bahkan orang gila dan orang yang sudah meninggal pun didata semuanya. Dan atas nama demokrasi keterlibatan masyarakat dalam pemilu dilihat representatif untuk mengatakan partisipasi mereka dalam urusan politik. Itulah bukti pemahaman yang sempit terhadap demokrasi. Sangat dangkal. Kebalikannya (dari pendataan jelang pemilu) ketika bantuan dari pemerintah mau disalurkan. Apa yang terjadi? Tidak semua orang didata. Tidak ada perlakuan seperti jelang pemilihan umum. Hanya orang-orang tertentu. Kadang-kadang, dengan berbagai alasan yang dicari-cari, tidak tepat sasaran. Bantuan yang

seharusnya untuk orang miskin malah diterima oleh orang kaya. Karena apa? Sistem pemerintahan tingkat bahwa yang buruk dan korup. Pada tingkat desa mulai ada kongkalingkong hanya memberi bantuan kepada golongan sendiri, keluarga sendiri, tanpa sungguh-sungguh objektif melihat situasi masyarakat.

Ini adalah situasi demokrasi politik kita demokrasi politik di negara kita ini. Demokrasi yang pincang. Masyarakat dibatasi dalam keterlibatannya untuk mengurus hal-hal politik. Lihat saja para anggota dewan kita. Tidak jarang (bahkan paling banyak) mereka baru hadir menjelang pemilihan umum. Setelah itu mereka di mana? Tidak ada. Hilang. Apa yang dijanjikan tinggal janji. Sayangnya masyarakat tetap memegang janji yang tanpa realisasi. Tentu saja sangat ironis. Di mana posisi masyarakat kecil di dalam nilai indeks ekonomi yang semakin meningkat? Mereka tidak berada di mana-mana. Karena narasi mereka adalah narasi kehidupan yang selalu berjuang antara hidup dan mati. Berjuang agar bisa bertahan hidup di tengah garangnya sistem yang menindas dan menegasikan kepentingannya. Sistem yang tanpa ampun menindas kaum lemah. Hal tersebut mau

tidak menjadi penonton dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi merupakan ruang yang diberikan kepada individu-individu. Sebuah ruang kebebasan.

Kusmanto dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik seperti kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak dan kebebasan memperoleh akses pendidikan dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dalam setiap kegiatan rapat pembangunan desa, setiap warga diberikan kebebasan memberi aspirasi atau menerima kritikan. Warga memiliki kebebasan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya, begitu juga dalam memperoleh akses pendidikan, semua warga selalu mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan warga yang lain (Kusmanto, 2014). Hasil penelitian tersebut tentu saja sangat menggembirakan. Masyarakat paham bagaimana terlibat dalam menjalankan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Paham demokrasi politik. Akan tetapi, apa yang ditemukan oleh Kusmanto ini tidak representatif untuk menunjukkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik di daerah-daerah pelosok tanah air. Kelemahan

dari penelitian ini adalah mengeneralisasi keterlibatan masyarakat dalam memahami dan menghayati demokrasi politik di tanah air. *Locus* yang berbeda tentu saja mempunyai konteks yang berbeda pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Liando (2016), di Sampin itu, menarik untuk disimak. Dia menemukan bahwa di kabupaten Minahasa pemilu dan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan calon wakil presiden di tahun 2014 terdapat sebuah dinamika. Tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis. Ada persoalan berkaitan dengan motivasi masyarakat. Apa yang menjadi faktor pendorong masyarakat untuk terlibat dalam pemilu? Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa ia memilih didorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional. Visi dan misi calon bukan merupakan ukuran dalam memilih. Ada ketegangan yang serius. Motivasi yang tidak murni dan kriteria calon yang dipilih tidak menjadi perhatian (Liando, 2016).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik yang masih digerakkan oleh uang menjadikan arena demokrasi Indonesia sebagai sebuah rimba politik. Siapa yang banyak uang dialah yang

menunjukkan bahwa masyarakat desa Benteng Tado mempunyai perhatian dalam tatakelola hidup berbangsa dan bernegara, hanya saja kesejahteraan mereka kurang diperhatikan.

Sebagaimana Munck (2016) memperluas penegasannya dengan mengatakan bahwa partisipasi politik masyarakat bukan hanya ikut memberikan suara pada setiap Pemilu/Pilkada, tetapi partisipasi politik masyarakat dapat dilihat pada keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Tidak hanya itu, tetapi juga peluang untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan (implementasi) dan pengawasan kebijaksanaan atau keputusan yang sudah ditetapkan (Munck, 2016). Mappakalu dalam hal ini menunjukkan pusat dan puncak partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik adalah apa yang terjadi pasca pemilu (Mappakalu, 2009). Pemilu hanya berlangsung sekali dalam lima tahun. Sedangkan perjuangan masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraan hidupnya tidak mengenal batas waktu.

Demokrasi politik, dengan sendirinya, menyoal keseharian masyarakat. Menyoal keterlibatannya dalam menciptakan keadilan, kestabilan

ekonomi, pembangunan yang merata sampai ke pelosok-pelosok, sistem yang tidak mengabaikan masyarakat kecil. Ia juga menyoroti perlakuan yang sewajarnya terhadap semua golongan masyarakat tanpa terkecuali, sistem pemerintahan, keputusan-keputusan pemerintah yang tidak memihak kaum kapitalis, pemilik modal, tidak memihak mayoritas. Singkat kata, demokrasi politik itu kompleks. Apa yang dialami masyarakat desa Benteng Tado, justru sebaliknya. Mereka mengakui bahwa kesejahteraan hidup mereka lebih banyak tidak diperhatikan setelah mereka mempunyai wakilnya di parlemen. Belum lagi diakui bahwa pemilu selama ini seringkali dimanfaatkan demi kepentingan elit politik atau pemerintah, bukan masyarakat kecil seperti masyarakat desa Benteng Tado.

Benarlah apa yang dikatakan Basuki dalam penelitiannya, rakyat atau warga negara bukan hanya sebagai obyek, melainkan subyek dan ikut memainkan peranan penting dalam kehidupan kenegaraan. Untuk itu keberadaan lembaga perwakilan merupakan suatu kemutlakan yang harus dipenuhi dalam negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. keberadaan lembaga ini seharusnya mengakomodasi

aspirasi-aspirasi rakyat agar mereka mengalami demokrasi yang sesungguhnya, bukan hanya pengakuan tetapi juga perlakuan terhadap mereka. Tidak mengherankan kalau Riyanto menyebut mereka sebagai “orang ketiga”, artinya orang tanpa identitas yang disingkirkan dari tata politik keseharian.

Meskipun demokrasi politik menyoroti peranserta masyarakat dalam kebebasan berpolitik, Saleh memberikan sebuah peringatan dalam hasil penelitiannya bahwa tidak ada demokrasi tanpa Partai Politik (Saleh, 2008). Tentu saja demikian. Apa yang dituntut masyarakat desa Benteng Tado dalam menghayati demokrasi adalah bahwa anggota DPR yang mereka pilih harus juga menyadari bahwa mereka adalah wakil rakyat. Demokrasi perwakilan tidak memaksudkan bahwa kesejahteraan hidup masyarakat diwakilkan oleh wakil mereka. Kalau anggota dewan sejahtera, maka terwujudlah kesejahteraan hidup masyarakat. Sungguh ironis.

Kesimpulan

Demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Di sana nini

memang membutuhkan perjuangan, karena masyarakat tidak selalu memahami keterlibatannya dalam tatakelola hidup bersama di dalam societias, di dalam NKRI. Adanya pemilihan umum dalam berbagai tingkatnya membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap salah satu tugasnya dalam menentukan peziarahan bangsa ini secara institusional-konstitutif. Pemilu merupakan hanya merupakan salah satu sarana, tetapi sekaligus sangat penting dan fondasional. Pemilu menjadi salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Meskipun demikian masyarakat tidak terlibat langsung dalam mengambil keputusan, pemilihan umum dilakukan dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Pemilu hanya merupakan langkah awal bagi masyarakat, karena keterlibatannya pasca-pemilu tidak bisa diabaikan, dalam mewujudkan kesejahteraan hidup bersama.

Studi ini akhirnya menemukan bahwa, *pertama*, pemahaman

masyarakat desa Benteng tado terhadap demokrasi masih terbatas pada keterlibatan mereka dalam pemilihan umum. Mereka belum cukup memiliki pemahaman mengenai apa yang perlu mereka lakukan pasca pemilu sebagai masyarakat yang berdemokrasi. Tentu saja jauh dari pemahaman Armada Riyanto mengenai politik sebagai pengalaman keseharian. Lebih lagi karena sosialisasi tentang demokrasi kurang mendapat perhatian di daerah ini. Sosialisasi tentang bagaimana memberikan hak suara pada pemilu tentu saja bukan pemahaman demokrasi politik yang mendalam. Cita-cita demokrasi sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 2 UUD 1945 belum tercapai sepenuhnya. Motivasi masyarakat dalam pemilu, seperti juga diungkapkan Liando dalam pengalaman masyarakat Kabupaten Minahasa, tidak murni. Dalam banyak kesempatan, masyarakat digerakkan tanpa punya pendirian. Motivasi uang, misalnya, dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari urusan kesejahteraan hidupnya secara menyeluruh dan kontinyu.

Kedua, keterlibatan mereka dalam berbagai pemilu tidak memberi jaminan kepada mereka untuk mengalami demokrasi secara sosioekonomi. Dalam hal inilah mereka mengalami situasi

teralienasi dari tata demokrasi keindonesiaan. Keterlibatan masyarakat desa Benteng Tado dalam pemilihan umum rupanya belum memberikan sumbangan harga bagi perkembangan perekonomiannya. Dalam pemahaman Riyanto, mereka masih berada di posisi “orang ketiga” dalam tata demokrasi politik tanah air. Masyarakat yang tidak memahami perannya dalam sistem demokrasi politik di negara ini kerap dimanfaatkan demi kepentingan-kepentingan penguasa politik, partai politik. Pemilihan umum memungkinkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan semua pihak (societas) terakomodasi. Tujuannya adalah terwujudnya kehidupan yang lebih baik, bonum commune (kesejahteraan bersama). Inilah yang menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokrasi suatu bangsa.

Demokrasi politik tentu saja mempunyai dinamikanya. Sebuah negara yang telah memilih untuk menjadi negara demokratis tentu tak lepas dari masalah yang berkaitan dengan partai politik dan sistem pemilihan umumnya. Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi, sedangkan sistem pemilu merupakan mekanisme dalam melembagakan kekuasaan secara konstitusional. Akan tetapi, jangan

- Kosmik Hukum*, 20(2), 81.
<https://doi.org/10.30595/kosmik hukum.v20i2.8321>
- Fikri, S. (2018). Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal). *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 18(2), 167–181.
<https://doi.org/10.19109/tamaddu n.v18i2.2701>
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 12 No*(Januari-Juni), 133–154.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(1), 78–90.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/17190>
- Mappakalu, H. A. M. (2009). Partisipas Politik Masyarakat Memperkokoh Pelaksanaan Pilar Demokrasi. *Administrasita'*, 6(1), 33–42.
- Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 47.
<https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.783>
- Munck, G. L. (2016). What is democracy? A reconceptualization of the quality of democracy. *Democratization*, 23(1), 1–26.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2014.918104>
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 2(10).
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(9), 16–30.
- Ristian, A. (2016). Demokrasi dan Kekuasaan Politik Calon Incumbent. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 189–202.

